

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)

Wonosari, 2 Agustus 2017

Yth.

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami masyarakat sipil yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS) menyampaikan keberatan kami tentang **pembiaran proses pengrusakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pegunungan Sewu, khususnya di kawasan Pantai Seruni, Tepus, Gunungkidul**. Kami sebut pembiaran karena telah kami saksikan bagaimana kawasan karst seluas lebih dari delapan hektare digempur dan diratakan demi pembangunan fasilitas pariwisata bagi kalangan menengah ke atas, yang konon telah mendapatkan restu dari Pemerintah Daerah Gunungkidul.

Proyek bernama "South Mountain Paradise" tersebut adalah prakarsa pembangun PT. Gunung Samudera Tirtomas, yang tanpa sungkan menyebut bahwa lahan seluas 2.000.000 m² telah menjadi hak mereka untuk dijual kembali dalam bentuk resort, hotel, villa, dan perumahan eksklusif. Proyek ini diiklankan di media massa dan media sosial tanpa sedikitpun menyebutkan bahwa seluruh kawasannya dibangun di atas KBAK yang merupakan kekayaan alam sekaligus pelindung kehidupan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya.

KBAK Gunung Sewu memiliki komponen geologi yang unik, berfungsi mengatur tata air dan mengandung nilai ilmiah. Karena itulah UNESCO dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai kawasan lindung geologi yang wajib dilestarikan demi keseimbangan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, adalah sedikit saja bukti bahwa KBAK Gunung Sewu yang terletak di Gunungkidul harus dikelola sesuai daya dukung lingkungannya. Artinya, pengelolaan kawasan lindung geologi harus mengacu pada wawasan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan ekosistem, melestarikan keunikan bentukan karst eksokarst maupun endokarst, serta memaduserasikan pengelolaan kawasan lindung geologi dengan tujuan

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata berwawasan lingkungan karena KBAK adalah warisan dunia untuk anak cucu kita.

Kami menolak dan tak mungkin tinggal diam menyaksikan pengrusakan seketika karena proyek pembangunan di atas bentang alam karst Gunungkidul, khususnya yang mendesak saat ini adalah pembangunan tanpa izin oleh PT. Gunung Samudera Tirtomas di Pantai Seruni.

Kami mendesak Kepala Daerah dan segenap Aparatur Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk menghentikan proses-proses perizinan yang bisa meloloskan proyek pembangunan tanpa wawasan lingkungan di Pantai Seruni tersebut. Karena membiarkan pembangunan berlangsung tanpa izin dan seolah-olah mempermudah proses pembangunan di Pantai Seruni, saat ini Pemerintah Daerah Gunungkidul sedang mendukung pengrusakan KBAK. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Gunungkidul melanggar aturannya sendiri, khususnya Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul tersebut.

Sebagai penutup, kami menunggu PEMBATALAN STUDI AMDAL DAN PENGHENTIAN PROSES PEMBANGUNAN RESORT, HOTEL, VILLA OLEH PEMRAKARSA PT. GUNUNG SAMODERA TIRTOMAS (PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS) DI DESA TEPUS, KECAMATAN TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Demikian surat terbuka ini kami tuliskan dan sampaikan pada Kepala Daerah Gunungkidul dan segenap aparat Pemerintah Daerah Gunungkidul. Atas perhatian dan integritas Ibu Bupati dalam menegakkan aturan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Gunungkidul, kami ucapkan terima kasih.

Salam sejahtera,

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)

Narahubung:

Halik Sandera (085228380002)

Adi (082138234694)

Organisasi dan Individu:

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta
2. Komite Bersama Reformasi (KBR)
3. Jogja Darurat Agraria (JDA)
4. Rumah Belajar Rakyat (RBR)
5. Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG)
6. Forum LSM DIY
7. Ponpes Sunan Kalijaga
8. LPM Ekspresi
9. Komite Perjuangan Rakyat Yogyakarta (KPRY)
10. Mc-PRB Gunungkidul
11. Lakpesdam NU Gunungkidul
12. Asosiasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
13. PIA-Yogyakarta
14. Rumpun Cut Nyak Diem (RTND)
15. Venussia (PKBI Yogyakarta)
16. Perempuan Mahardhika Yogyakarta
17. Mail Kribo
18. Galuh Drajad Swastilaksmi
19. Aan Kusriyadi
20. Erda Agony
21. Partai Rakyat Demokratik (PRD)
22. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ar fakhruddin
23. Rumah Baca Komunitas (RBK)
24. Victoria Sundari Handoko, S.Sos.,M.Si. (Dosen Sosiologi Atma Jaya Yogyakarta)
25. Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jogja
26. Front Perjuangan Rakyat Sukamulya
27. Poros UAD

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)

28. Mahasiswa Pekalongan Raya (Ormada Mahakarya)
29. Poros Gunungkidul
30. MAP Corner Klub MKP UGM
31. SATUNAMA
32. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) DIY
33. Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta
34. Perkumpulan IDEA
35. Needle n' Bitch Collective
36. Widodo, Petani Kulon Progo
37. Nurwiji, Petani Kulon Progo
38. Dwi Priyono, Lembaga Konsumen Yogyakarta
39. Dwi Haryanto (Paguyuban Sendang Bodro Sejati, Darmosito, Giriwoyo, Wonogiri)
40. AKSARA

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)



Gambar 1.1. Tampak depan Kantor PT. Gunung Samudra Tirtomas di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No.107, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia. Proyek South Mountain Paradise City di Gunungkidul disebutkan telah menguasai 2.000.000m² di atas KBAK Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 1.2. Proyek Pembangunan di Pantai Seruni. Foto diambil 27 Juli 2017

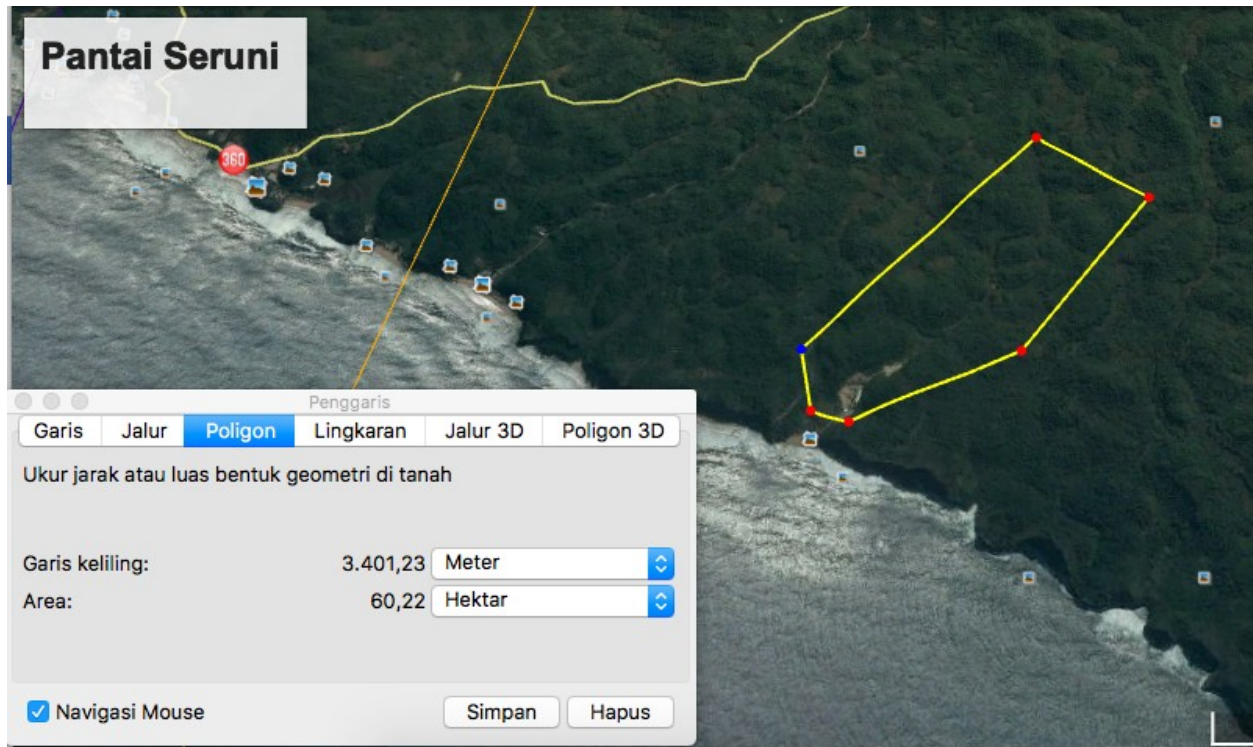
Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)



Gambar 1.3-5.

Nampak pada foto, ponor dan bukit karst yang menjadi salah satu ciri KBAK, telah mengalami kerusakan akibat pembangunan South Mountain Paradise di Pantai Seruni. Foto diambil 30 Juli 2017.

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)



Gambar 1.6 – 8. Citra satelit menunjukkan Pantai Seruni tahun 2007, 2013, dan 2017. Citra 2017 menyertakan luas kawasan yang disebut-sebut telah menjadi milik PT. Gunung Samudera Tirtomas.

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS)



Gambar 1.9. Citra satelit menunjukkan KBAK yang telah dirusak namun diajukan untuk rencana dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 24 Juli 2017.



Investor tertarik investasi hotel di Gunung Kidul

Jumat, 9 Desember 2016 20:17 WIB

Pewarta: Sutarmi

Gunung Kidul (Antara) - Calon investor perhotelan dan resort mulai tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring meningkatnya kunjungan wisata di wilayah ini.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gunung Kidul Tommy Harahap di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan pertumbuhan wisata mampu menarik investor. Satu di antaranya hari Jumat ini menyampaikan rencana pembuatan resort di Pantai Seruni di

"Hari ini, mereka presentasi dihadapan bupati terkait rencana pembangunan resort. Hal ini penting untuk dilakukan agar bisa mengetahui apakah nantinya pembangunannya sesuai dengan peraturan atau tidak," kata Tommy.

Ia mengatakan calon investor harus melengkapi izin mulai lokasi, izin mendirikan bangunan, amdal hingga rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, investor juga wajib mengikuti peraturan dari luas tanah 40 persen merupakan kawasan hijau.

"Untuk yang di Pantai Seruni, mereka memiliki tanah yang dibeli dari masyarakat seluas 20-an hektare," katanya.

Tommy menyampaikan nantinya pemkab akan mengkaji terkait konsep yang akan dibangun para investor. salah satunya terkait bangunan, akan ada tim dari Dinas Pekerjaan Umum yang mengkaji, apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

"Masih tahap awal, nanti akan dikaji. Kalau tidak sesuai maka akan disesuaikan," ucapnya.

Ia mengungkapkan sebenarnya akan dibangun juga kota satelite namun izin terkait pendirian kota satelite tidak ada di pemkab, namun di pusat.

"Mengurus izin kota satelite harus ke pusat, jadi fokus ke pembangunan resort di Pantai Seruni," katanya.